**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Hakikat Pendidikan Alternatif**
2. **Pengertian Pendidikan**

Menurut Marlina Gazali istilah “pendidikan berasal dari kata “didik” dengan mendapat awalan “pe” dan akhiran “kan” mengandung arti perbuatan”[[1]](#footnote-1).

Diungkapkan lagi bahwa:

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu: *Paedgogik”* yang berarti bimbingan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yakni *“Education”* yang berarti pengembangan dan bimbingan. Selanjutnya dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan *“Tarbiyah”* yang berarti pendidikan.[[2]](#footnote-2)

Sedangkan menurut Radja Mudyaharjo mendefinisikan pendidikan menurut Etimologi adalah:

Usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang[[3]](#footnote-3).

Menurut Ki Hajar Dewantara (dalam Marlina Gazali) mengatakan:

pendidikan adalah daya upaya untuk memberikan tuntunan pada segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang setinggi-tingginya[[4]](#footnote-4).

Selain itu juga Redja Mudyahardjo berpendapat bahwa:

pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terpogram dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu agar dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tetap[[5]](#footnote-5).

Selanjutnya pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara[[6]](#footnote-6).

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah suatu proses pengalaman terus-menerus, termasuk perbaikan dan penyusunan kembali pengalaman. Karena kehidupan itu adalah merupakan pula proses pertumbuhan, maka pendidikan membantu pertumbuhan atau kehidupan yang tepat tanpa dibatasi oleh usia.

1. **Tujuan Pendidikan**

Menurut sejarah bangsa Yunani, tujuan pendidikannya ialah “ketentraman. Sedangkan menurut Islam, tujuan pendidikan ialah membentuk manusia supaya sehat, cerdas, patuh, dan tunduk kepada perintah Tuhan serta menjauhi larangan-larangan-Nya”[[7]](#footnote-7).

Suardi mengatakan Tujuan pendidikan adalah:

Seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan, yakni bimbingan pengajaran atau latihan, diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Dalam konteks ini tujuan pendidikan merupakan komponen dari sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan fungsi sentral. Itu sebabnya setiap tenaga pendidikan perlu memahami dengan baik tujuan pendidikan[[8]](#footnote-8).

Dalam Suwarno terdapat beberapa pengertian tujuan pendidikan menurut beberapa tokoh, diantaranya:

1. Ki Hadjar Dewantoro mengatakan tujuan pendidikan adalah mendidik anak agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dengan alamnya (kodratnya) dan masyarakatnya.
2. Johan Amos Comenius mengatakan tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang mempunyai pengetahuan kesusilaan dan kasalehan sebagai persiapan untuk kehidupan di akherat.
3. John Locke (tokoh aliran Empirisme dalam pendidikan) mengatakan tujuan pendidikan adalah membentuk “Gentlemen”.
4. J.J. Rousseau mengatakan tujuan pendidikan adalah mempertahankan kebaikan yang ada pada manusia membentuk anak menjadi anggota masyarakat yang natural.
5. John Heinrich Pestalozzi mengatakan tujuan pendidikan adalah mempertinggi derajat rakyat (social regeneration) dengan mengembangkan potensi jiwa anak secara wajar.
6. Helen Parkhurst mengatakan tujuan pendidikan adalah membentuk anak menjadi warga negara yang baik[[9]](#footnote-9).

Karena pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan manusia menuju ke arah cita-cita tertentu, maka masalah pokok bagi pendidikan ialah memilih arah atau tujuan.

Tujuan itu menunjukkan arah dari suatu usaha, sedangkan arah tadi menunjukkan jalan yang harus ditempuh dari situasi sekarang ke situasi berikutnya. Dalam meninjau tujuan sebagai arah ini, tidak ditekankan pada masalah ke jurusan mana garis yang telah memberi arah pada usaha tersebut.

Tujuan di samping dapat dipandang dari segi titik tolaknya, juga dapat dipandang dari segi titik akhir yang akan dicapainya. Di sini perhatian pada hal yang akan dicapai yang terletak pada jangkauan masa datang, dan bukan pada situasi sekarang atau pada jalan yang harus diambil dalam situasi tadi.

Tujuan pendidikan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan yang dimaksud disini bukan semata-mata kecerdasan yang hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual saja, melainkan kecerdasan meyeluruh yang mengandung makna lebih luas.

Tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 berbunyi :

pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab[[10]](#footnote-10) .

Suwarno mengatakan ada beberapa macam tujuan pendidikan, diantaranya sebagai berikut :

1. Tujuan umum
2. Tujuan khusus
3. Tujuan tak lengkap atau tak sempurna
4. Tujuan sementara
5. Tujuan insidentil
6. Tujuan intermediair[[11]](#footnote-11)

Macam-macam tujuan pendidikan yaitu:

1. Tujuan nasional

Tujuan nasional ialah “tujuan umum pendidikan nasional yang mengandung rumusan kualifikasi umum yang diharapkan akan dimiliki oleh setiap warga negara setelah mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan nasional tertentu”[[12]](#footnote-12).

1. Tujuan institusional

Tujuan institusional adalah “tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga pendidikan atau satuan pendidikan tertentu”[[13]](#footnote-13). Tiap lembaga pendidikan memiliki tujuannya masing-masing yang berbeda satu sama dengan yang lainnya dan yang sesuai dengan karakteristik lembaga tersebut.

1. Tujuan kurikulum

Tujuan kurikulum adalah “tujuan yang hendak dicapai oleh program studi, bidang studi, dan mata pelajaran tertentu yang disusun berdasarkan tujuan institusional”[[14]](#footnote-14). Perumusan tujuan kurikulum berpedoman pada kategorisasi tujuan pendidikan atau taksonomi tujuan, yang dikaitkan dengan bidang studi bersangkutan.

1. Tujuan instruksional

Tujuan ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum dan khusus. Suwarno mengatakan:

Tujuan instruksional umum berisi kualifikasi yang merupakan pernyataan hasil belajar yang diharapkan dimiliki oleh si terdidik setelah mengikuti pelajaran dalam pokok bahasan tertentu. Tujuan instruksional khusus merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan instruksional umum, dinyatakan dalam rumusan sekhusus-khususnya, sehingga tujuan tersebut mudah dinilai dan tidak menimbulkan salah tafsir[[15]](#footnote-15).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan adalah komponen dari sistem pendidikan yang berisi seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional Indonesia tertera dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

1. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendidikan**

Keberhasilan dalam pendidikan ialah mimpi semua orang tua dan anak anak. Banyak cara dilakukan orang tua dengan memberikan pelajaran tambahan dan perhatian tambahan untuk anak. Tapi terkadang anak masih saja mengalami kesulitan dalam hal belajar. Tentu ini menjadi masalah kita bersama.

Dalam proses belajar mengajar di institusi pendidikan banyak sekali faktor yang mempengaruhi kesuksesan anak dalam belajar. Keberhasilan belajar pendidikan merupakan hal yang sangat diharapkan guru dalam melaksanakan tugasnya, namun guru bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut. Menurut Syaiful Bahri Djamarah ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan yaitu: “Faktor tujuan, guru, peserta didik, kegiatan pengajaran, alat evaluasi, bahan evaluasi dan suasana evaluasi”[[16]](#footnote-16).

Abuddin Nata mengatakan ada beberapa Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pendidikan yaitu.

1. Pendidik yang mampu untuk memainkan peranan dan fungsinya dalam menjalankan tugas keguruannya secara proporsional dan mampu menjadi motivator serta fasilitator dalam proses belajar mengajar disekolah.
2. Peserta didik yang bersih hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa, anak didik yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia seperti, bersikap benar, taqwa, ikhlas, zuhud, merendahkan diri dan ridha. Peserta didik yang selalu menghormati gurunya dan selalu berusaha untuk senantiasa memperoleh kerelaan dari guru.
3. Kurikulum. berbasis kompetensi yang selaras dengan fitrah insani, yaitu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan psikis, sosial, budaya, fisik, dan intelektual untuk melakukan kompetensi atau tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan tehadap seperangkat kompetensi tertentu.
4. Metode pendidikan yang berdaya guna dan berhasil guna dan menimbulkan kesadaran  anak didik untuk mengamalkan  ketentuan ajaran agama Islam melalui teknik motivasi yang menimbulkan gairah belajar anak didik secara mantap. Disamping berdaya guna untuk mengantarkan tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan.
5. Sarana dan Prasarana yang bisa memotivasi belajar siswa terhadap ajaran agama Islam yang tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan barang atau peralatan, tetapi juga ide, gagasan, prosedur, teknik, dan strategi yang dikembangkan oleh pihak sekolah atau dari pihak pemerintah[[17]](#footnote-17).

Tommy syatriadi mengatakan ada 3 faktor utama keberhasilan pendidikan yaitu sebagai berikut:

1. Sekolah yang merupakan salah satu kunci keberhasilan siswa. Tapi banyak yang berfikir sekolah itu hanya 1 1nya kunci kesuksesan anak sehingga mereka ngotot menyekolahkan anaknya ditempat yang mahal. Karena timbulnya pandangan seperti ini maka timbul pula pandangan yang menganggap semua sekolah itu sama tergantung pada siswanya... Kedua dua nya benar tapi kesalahan terjadi ketika orang hanya mengikuti paham yang pertama tanpa memperhatikan paham yang kedua pasti akan terjadi kedaaan dimana orang tua lepas tangan untuk mengurusi pendidikan anak. Sebaliknya kalau hanya berpegang pada peham kedua saja akan muncul keadaan dimana sekolah tidak mendukung minat dan bakat siswa.
2. Orang tua yang partisipasif dalam pendidikan anak sangat baik untuk perkembangan mental anak dan kesuksesan proses belajar mengajar. Orang tua bisa partisipasi dalam menuntun anak pada minat yang tepat sehingga mereka bisa sukses kelak. Orang tua juga sangat berperan untuk berkomunikasi dengan guru pengajar untuk membimbing anaknya belajar. Jika peran orang tua diabaikan anak tentu akan sulit berhasil dalam pendidikannya. Tapi tetap saja peran orang tua tetap harus pada komposisi yang tepat di mana tidak boleh berlebihan sehingga membuat anak nyaman untuk bersosialisasi karena ada juga jenis orang tua yanng terlalu berlebihan sehingga anak tidak nyaman berteman dengan teman temannya
3. Lingkungan sebagai tempat anak menjalankan proses belajar dan mengajar. Lingkungan yang dimaksud juga ialah pergaulan si anak. Orang tua berperan penting disini untuk memberikan pandangan mencari teman yang baik dan bisa membawa anak berkembang ke arah yang lebih baik. Orang tua hendaklah tidak menjaga anak terlalu protektif dan tidak juga terlalu bebas yang terpentin gadalah anak nyaman bersosialisasi dan juga tetap tidak menyimpang[[18]](#footnote-18).

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan antara lain: faktor tujuan, pendidik, peserta didik, kegiatan pengajaran, alat dan bahan evaluasi serta suasana evaluasi. Faktor-faktor tersebut tidak bisa berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dan saling menunjang.

1. **Pendidikan Alternatif**

Pemikiran tentang pendidikan alternatif bermula dari kritik-kritik Rowo Mangun terhadap bentuk pendidikan yang sejak berlakunya kurikulum 1974, berkembang hingga kurikulum 1994.

Pendidikan alternatif tidak diartikan sebagai pengganti sekolah formal, melainkan mencari materi dan metode dedaktik baru sampai kurikulum baru. pendidikan seharusnya bersifat kontekstual, harus disesuaikan dengan lingkungan.

Kata alternatif dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah “pilihan yang merupakan keharusan”. Jadi pendidikan alternatif adalah “usaha atau proses pengubahan sikap dan tingkahlaku yang menjadikan keharusan bagi seseorang atau sekelompok dalam mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan”[[19]](#footnote-19).

Dalam proses pendidikan, Situasi pendidikan merupakan peristiwa berlangsungnya, yakni ketika terjadi gejala-gejala proses pendidikan seperti pendidik yang mentransfer nilai-nilai tanggungjawab sampai menyiapkan anak didik untuk kehidupan di masyarakat. Hal ini memerlukan situasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Pengkajian teoritis mengenai pendidikan alternatif memiliki cakupan ruang lingkup yang sangat universal sekaligus memiliki keterkaitan erat dengan konsep pendidikan luar sekolah (*non formal*). Istilah pendidikan alternatif, oleh para ahli diidentikkan pula dengan program pendidikan berbasis masyarakat. Karena pada dasarnya pendidikan alternatif, pendidikan luar sekolah, dan pendidikan berbasis masyarakat memiliki persamaan dalam operasionalisasinya. Oleh karena itu, mendeskripsikan pendidikan alternatif dalam penelitian ini senantiasa mengkorelasikan hubungan ketiga istilah tersebut dalam satu kerangka sistematis. Konsep dasar tersebut meliputi pengertian, tujuan dan bentuk-bentuk pendidikan alternatif.

Selanjutnya Badudu Zain mengatakan istilah pendidikan alternatif merupakan istilah baru sekaligus konsep baru dalam dunia pendidikan nasional. Kata alternatif yang berarti “cara lain atau bentuk lain”[[20]](#footnote-20) memberikan indikasi bahwa pendidikan alternatif merupakan “bentuk lain dari sistim pendidikan konvensional”[[21]](#footnote-21). Dengan demikian pendidikan alternatif pada dasarnya mengacu pada system pendidikan yang telah ada sebelumnya, akan tetapi mengalami pembaharuan dalam bentuk pilihan-pilihan alternatif yang strategis. Pengertian secara etimologi ini kemudian dikembangkan secara terminologi oleh para ahli berdasarkan perspektifnya masing-masing.

Pendidikan alternatif merupakan sistim pendidikan luar sekolah. Oleh karena itu, penyelenggaraanya senantiasa mengacu pada bentuk-bentuk pendidikan luar sekolah. Sejalan dengan itu, Umberto sihombing menguraikan bahwa:

Pendidikan alternatif sebagai model pendidikan luar sekolah berusaha mencari jawaban dengan menelusuri pola-pola pendidikan yang ada, seperti pesantren, madrasah, dan pendidikan keagamaan lainnya yang keberadaannya sudah jauh sebelum Indonesia merdeka, bertahan hidup sampai sekarang dan dicintai, dihargai dan diminati serta berakar dalam masyarakat. Kelanggengan lembaga-lembaga tersebut karena tumbuh dan berkembang, dibiayai dan dikelola untuk kepentingan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat merasakan adanya kebermaknaan dari program-program belajar yang disajikan bagi kehidupannya karena pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat.[[22]](#footnote-22)

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan alternatif sebagai model pendidikan luar sekolah hendaknya menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam berdasarkan karakteristik spesifik wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena potensi dan karakteristik pada wilayah tertentu juga berbeda-beda. Secara implisit perbedaan pengertian ini, mengindikasikan bahwa pendidikan alternatif merupakan wujud dari pendidikan luar sekolah yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga-lembaga lain serta berorientasi pada masyarakat.

Pendidikan yang berorientasi masyarakat dalam hal ini dapat menunjuk pada derajat peran serta masyarakat dalam penyelenggaraannya. Seperti dikemukakan oleh Dean Nielsen dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi sebagai berikut:

Pendidikan berbasis masyarakat, maka sepenuhnya menjadi milik masyarakat. Kepemilikan mengimplikasikan adanya pengendalian secara penuh terhadap pengambilan keputusan. Kepemilikan penuh berarti bahwa masyarakat memutuskan tujuan dan sasaran, pembiayaan (tingkatan dan sumber), kurikulum, materi belajar (misalnya buku teks), standar dan ujian, guru dan kualifikasinya, persyaratan siswa atau peserta, tempat, atau pokoknya segalanya.[[23]](#footnote-23)

Pernyataan ini memberikan indikasi bahwa pendidikan alternatif berbasis masyarakat dapat dilihat derajat keterlibatan penuh masyarakat, atau paling tidak adanya perimbangan antara pemerintah versus masyarakat dalam hal pengendalian penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan alternatif harus bertumpu pada masyarakat, bukan pada pemerintah. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu program pendidikan alternatif dikembangkan, perlu dipahami dengan benar apa dan bagaimana masyarakat itu sehingga dapat diungkap kebutuhan nyata dan kekuatan yang ada di masyarakat. Program yang disusun kemudian dibahas dengan masyarakat dan menyerahkan pengelolaannya kepada masyarakat.

Ada lima aspek yang menjadi acuan penyelenggaraan konsep pendidikan alternatif yang berbasis masyarakat:

*Pertama*, teknologi yang dipelajari hendaknya sesuai dengan kondisi dan situasi nyata yang ada di masyarakat. *Kedua,* kelembagaan atau wadah yang statusnya jelas dimiliki atau dipinjam, dikelola, dikembangkan oleh masyarakat. *Ketiga*, program belajar harus bernilai sosial atau harus bermakna bagi kehidupan peserta didik atau warga belajar. *Keempat* kelembagaan harus menjadi milik masyarakat, bukan milik instansi pemerintah. Dan *kelima* menyangkut bangunan bermitra dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan[[24]](#footnote-24).

Dari lima aspek tersebut di atas, maka konsep pendidikan alternatif yang dianut pula oleh pendidikan luar sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dirancang, diatur, dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat tertentu dengan berorientasi pada masa depan dan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Relevan dengan konsep pendidikan alternatif di atas, Suyanto & Abbas mengemukakan bahwa “pendidikan Alternatif menekankan pentingnya pemahaman akan kebutuhan masyarakat dan cara pemecahan masalah yang ada di masyarakat dengan menggunakan potensi yang ada di lingkungannya”[[25]](#footnote-25). Sementara itu, Watson dalam Sihombing mengemukakan bahwa pendidikan alternatif yang berbasis masyarakat memiliki tiga elemen:

*Pertama*, mementingkan warga belajar atau berorientasi pada pengembangan program belajar, karena setiap orang mempunyai kemampuan belajar karena setiap warga belajar memiliki kekuatan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman, serta ada kesetaraan di antara warga dan Pembina program. *Kedua*, program dimulai dari perspektif yang kritis. Dan *Ketiga*, pembangunan masyarakat yang menekankan bahwa program belajar harus berlokasi di masyarakat, menjawab kebutuhan belajar masyarakat, menciptakan rasa memiliki, dan program itu dirancang, diputuskan, serta diatur oleh masyarakat sehingga mereka membentuk kesatuan yang lebih besar[[26]](#footnote-26).

Tujuan pendidikan alternatif yang Berbasis masyarakat pada dasarnya mengacu pada tujuan pendidikan nasional secara umum. Meskipun demikian, tujuan tersebut disesuaikan pula dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar tidak tercipta situasi pendidikan yang sifatnya sentralistik dan bertolak belakang dengan prinsip pendidikan berbasis masyarakat yang menganut sistim desentralisasi. Dengan demikian sistim pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan pada masing-masing wilayah tertentu memiliki otonomi dalam pengelolaannya.

Sejalan dengan uraian tersebut, Fasli Jalal dan Dedi Supriadi mengemukakan bahwa tujuan utama pendidikan alternatif yang berbasis masyarakat adalah:

(1) membantu pemerintah dalam memobilisasi sumber daya lokal dan meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan pada semua tingkat, jenis, dan jalur pendidikan; (2) merangsang terjadinya perubahan sikap dan persepsi tentang rasa kepemilikan masyarakat terhadap sekolah, rasa tanggung jawab, kemitraan, toleransi, dan kekuatan multikultural; (3) mendukung prakarsa pemerintah dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah, khususnya orang tua dan masyarakat melalui kebijakan desentralisasi; (4) mendukung peranan masyarakat untuk mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan, dan mengganti peran persekolahan dan untuk meningkatkan mutu dan relevansi, penyediaan akses yang lebih besar, peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dasar untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (5) membantu mengatasi putus sekolah khususnya dari pendidikan dasar[[27]](#footnote-27).

Selanjutnya diuraikan pula mengenai manfaat pendidikan Alternatif yang berbasis masyarakat sebagai berikut:

(1) model membantu pemerintah dalam pengerahan sumber daya lokal dan eksternal; (2) model partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program pelatihan keterampilan fungsional untuk anak putus sekolah; (3) model stimulasi perubahan sikap dan persepsi masyarakatdalam hal rasa kepemilikan masyarakat akan sekolah dan lembaga pendidikan lanjutan lainnya; (4) model kebijakan desentralisasi pendidikan dengan meningkatkan dukungan masyarakat dan BP3 terhadap sekolah; (5) model dukungan terhadap masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan inovatif pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah[[28]](#footnote-28).

Berdasarkan pendapat tersebut peneliti berasumsi bahwa pendidikan berbasis masyarakat pada intinya memiliki 3 (tiga) tujuan utama yakni *pertama*, membantu program pembangunan dan pendidikan yang digalakkan oleh pemerintah termasuk upaya menciptakan desentralisasi sistim pendidikan nasional. *Kedua*, mendukung program pendidikan sekolah dan mengantisipasi segala permasalahannya, dan *ketiga*, meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengelola potensi atau kekayaan alam yang dimilikinya.

Beragamnya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan berimplikasi pada upaya untuk menciptakan berbagai bentuk atau model pendidikan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik masyarakat pada wilayah tertentu. Bentuk-bentuk tersebut idealnya mengacu pada sistim pendidikan luar sekolah yang diberlakukan. Soelaiman Joesoef mengelompokkan bentuk-bentuk pendidikan luar sekolah sebagai berikut:

1. *Kursus*, yakni Sebuah kegiatan belajar yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Seperti proses belajar mengajar mengajar formal, kursus memenuhi unsur-unsur pembelajaran yang berlaku, hanya saja lebih spesifik pada satu jurusan tertentu yang diharapkan nantinya dapat diterapkan dalam masyarakat secara langsung.
2. *Kelompok Belajar* yang terbentuk dengan sendirinya berdasarkan kesamaan kebutuhan akan pengetahuan atau keterampilan tertentu.
3. *Pusat Pemagangan*, yakni kegiatan belajar yang sekaligus sebagai tempat kerja sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan yang diinginkan dan terdiri dari dua bentuk yaitu *apprenti Peship* (peserta sama sekali belum memiliki pengetahuan tertentu) dan *internaship* (pendidikan lanjutan)
4. *Pusat Kegiatan Belajar*, yang merupakan wadah dimana terdapat satu komunitas yang belajar secara bersama-sama pada suatu tempat yang terpusat.
5. *Keluarga*, yaitu sebentuk pendidikan luar sekolah yang utama, tidak mengenal batas waktu dan tidak berstruktur. Belajar Sendiri, Secara individu seseorang belajar berdasarkan kemauan, target dan cita-cita yang dinginkannya sendiri, dimanapun, kapanpun dan diruang apa saja.
6. *Kegiatan Belajar*, yaitu proses pembelajaran yang secara sengaja dilakukan dalam kurun waktu singkat (sehari atau seminggu)[[29]](#footnote-29).

Berdasarkan pembagian tersebut, menurut asumsi peneliti, bentuk-bentuk pendidikan luar sekolah dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yakni pendidikan yang masih bergantung pada pemerintah dan sekaligus mengacu pada sistim pendidikan sekolah dan pendidikan yang sifatnya mandiri berdasarkan swadaya masyarakat setempat. Namun demikian, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, pendidikan luar sekolah juga mengalami perkembangan.

Lebih khusus mengenai bentuk-bentuk pendidikan berbasis masyarakat, Fasli Jalal dan Dedi Supriadi membaginya dalam berbagai kategori antara lain Pusat Pendidikan Belajar Masyarakat (PPBM), Kelompok Kerja Sekolah/Madrasah (KKS-KKM), Pesantren Untuk Pendidikan Dasar (PUPD) dan Sekolah-Masjid Percontohan Untuk Pendidikan Dasar[[30]](#footnote-30).

Mengakumulasi berbagai pemikiran teoritis tersebut di atas maka dapat direduksi deskripsi konsep dasar pendidikan alternatif yakni; *Pertama*, pendidikan alternatif merupakan salah satu bentuk inovasi atau pembaharuan di bidang penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kelemahan sistim pendidikan. *Kedua*, bentuk-bentuk pendidikan alternatif merupakan pengembangan dari sistim pendidikan luar sekolah yang lebih berorientasi pada pendidikan yang berbasis masyarakat serta konsep pengembangannya senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat utamanya di bidang pendidikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan alternatif merupakan istilah generik yang meliputi sejumlah besar program atau cara pemberdayaan peserta didik yang dilakukan berbeda dengan cara tradisional. Secara umum berbagai bentuk pendidikan alternatif itu mempunyai tiga kesamaan yaitu: pendekatannya yang lebih bersifat individual, memberikan perhatian lebih besar kepada masyarakat dalam hal ini peserta didik, orangtua/keluarga, dan pendidik, serta yang dikembangkan berdasarkan minat dan pengalaman.

1. **Bentuk-Bentuk Pendidikan Alternatif**

Jerry Mintz mengemukakan berbagai ragam pendidikan alternatif yang dapat dikategorisasikan dalam empat bentuk pengorganisasian, yaitu : 1) sekolah publik pilihan (*public choice*); 2) sekolah/lembaga pendidikan publik untuk siswa bermasalah (*students at risks*); 3) sekolah/lembaga pendidikan swasta atau independen; dan 4) pendidikan di rumah (*home-based schooling*) [[31]](#footnote-31).

1. Sekolah Publik Pilihan (*public choice*)

Sekolah publik pilihan adalah lembaga pendidikan dengan biaya negara atau dalam pengertian sehari-hari disebut sekolah negeri, yang menyelenggarakan program belajar dan pembelajaran yang berbeda dengan program regular atau konvensional, namun mengikuti sejumlah aturan baku yang ditentukan[[32]](#footnote-32).

Perbedaan pokok pendidikan alternatif dengan pendidikan reguler terletak pada komponen masukan, baik masukan mentah maupun instrumental, dan komponen proses. Sedangkan pada komponen keluaran biasanya diikuti aturan baku yang ditentukan. Rambu-rambu keluaran diusahakan sama atau setara dengan rambu-rambu sekolah konvensional. Meskipun demikian terbuka pula kemungkinan bahwa rambu-rambu keluaran itu diserahkan kepada masyarakat untuk menentukannya.

Salah satu contoh sekolah publik pilihan adalah sekolah terbuka atau korespondensi (jarak jauh)[[33]](#footnote-33). Sekolah ini diselenggarakan untuk memberi kesempatan kepada anak-anak yang karena mengalami hambatan fisik, sosial-ekonomi, dan geografi tidak dapat mengikuti sekolah konvensional/regular. Karena adanya hambatan itu maka dikembangkan bahan belajar yang dapat dikemas dan dikirimkan kepada siswa. Bahan belajar ini dapat berupa cetakan, rekaman suara, rekaman video, siaran radio, siaran televisi, disket atau bentuk lain. Proses pembelajaran juga berbeda dengan sekolah regular, yaitu dengan menerapkan konsep belajar mandiri, belajar berkelompok sebaya, belajar kooperatif, tutorial serta pada waktu dan tempat yang sesuai dengan kondisi dan situasi siswa. Namun ada sejumlah aturan yang sama atau setara dengan sekolah regular dan yang harus diikuti, seperti misalnya kenaikan kelas dan ujian akhir.

Contoh lain dari sekolah publik pilihan adalah sekolah unggulan atau bahkan program unggulan dalam sekolah regular. Bentuk terakhir ini dapat pula dikatakan sebagai sekolah dalam sekolah. Sekolah/program unggulan ini disebut juga *magnet school* (sekolah magnit) atau *seed school* (sekolah bibit). Disebut sekolah magnet karena sekolah ini menawarkan program unggulan, seperti misalnya olahraga atau seni pertunjukkan, yang menarik perhatian siswa yang berminat atau berbakat dalam bidang unggulan tersebut. Disebut sebagai sekolah bibit karena program pendidikan yang diselenggarakan menghasilkan siswa-siswa yang mempunyai keunggulan dalam program yang ditekuni.

1. Sekolah/lembaga pendidikan publik untuk siswa bermasalah (*students at risks*)

Sekolah atau lembaga pendidikan publik untuk siswa bermasalah juga mempunyai banyak bentuk. Pengertian “siswa bermasalah” meliputi mereka yang :

* Tinggal kelas karena lambat belajar
* Nakal atau mengganggu lingkungan (termasuk mereka dalam lembaga pemasyarakatan anak
* Pasangan suami-isteri yang masih berusia sekolah, terutama ibu-ibu belia yang tidak mungkin mengikuti sekolah regular karena harus mengurus anaknya
* Korban penyalahgunaan obat terlarang atau minuman keras
* Korban trauma dalam keluarga karena perceraian orangtua, kekerasan, atau gelandangan
* Menderita karena masalah kesehatan, ekonomi, etnis atau kebudayaan, termasuk anak-anak suku terasing dan anak gelandangan.
* Putus sekolah karena berbagai sebab
* Belum pernah mengikuti program pendidikan sebelumnya[[34]](#footnote-34).

1. Sekolah/lembaga pendidikan swasta atau independen

Sekolah atau lembaga pendidikan swasta mempunyai jenis, bentuk dan program yang sangat beragam. Diantara jenis pendidikan yang termasuk dalam kategori ini lembaga pendidikan yang memberikan program bercirikan agama, seperti pesantren dan sekolah Minggu; lembaga pendidikan dengan program bercirikan ketrampilan fungsional, seperti kursus dan magang; lembaga pendidikan dengan program perawatan atau pendidikan usia dini, seperti penitipan anak, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak; dan lembaga pendidikan swadaya masyarakat dengan program pembinaan khusus untuk mereka yang bermasalah. Sekolah atau lembaga pendidikan swasta ini jauh lebih luwes dalam pengelolaan dan penentuan programnya dari pendidikan publik, karena biasanya mengikuti perkembangan pasar atau permintaan dan tidak harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada perbendaharaan negara.

1. Pendidikan di rumah (*home-based schooling*)

Pendidikan di rumah yang termasuk dalam kategori ini adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga sendiri terhadap anggota keluarganya yang masih dalam usia sekolah.[[35]](#footnote-35) Ketentuan tentang usia sekolah ini tergantung pada kebijakan negara yang bersangkutan. Indonesia dengan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas) menentukan usia sekolah itu antara 6 s/d 17 tahun. Pendidikan ini diselenggarakan sendiri oleh orangtua/keluarga dengan berbagai pertimbangan seperti misalnya : menjaga anak-anak dari kontaminasi aliran atau falsafah hidup yang bertentangan dengan tradisi keluarga (misalnya pendidikan yang diberikan oleh keluarga yang menganut fundamentalisme agama atau kepercayaan tertentu); menjaga anak-anak agar selamat atau aman dari pengaruh negatif dari lingkungan; menyelamatkan anak secara fisik maupun mental dari kelompok sebayanya; menghemat biaya pendidikan; memberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan anak secara individual; dan berbagai alasan lainnya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara garis besarnya pendidikan alternatif dapat dikategorikan dalam 4 kategori yaitu 1) sekolah publik pilihan (public choice); 2) sekolah/lembaga pendidikan publik untuk siswa bermasalah (students at risks); 3) sekolah/lembaga pendidikan swasta atau independen; dan 4) pendidikan di rumah (home-based schooling).

Secara umum berbagai bentuk pendidikan alternatif tersebut mempunyai tiga kesamaan yaitu : pendekatannya yang lebih bersifat individual, memberikan perhatian lebih besar kepada peserta didik, orangtua/keluarga, dan pendidik, serta yang dikembangkan berdasarkan minat dan pengalaman.

Adapun model pendidikan alternatif yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah kategori pendidikan alternatif yang termasuk dalam jenis sekolah publik pilihan. Lebih spesifik lagi sekolah publik yang dimaksud adalah SMP Terbuka 3 Kendari.

1. **Tinjauan Tentang Anak Putus Sekolah**
2. **Deskripsi Anak Putus Sekolah**

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa “putus sekolah diartikan meninggalkan sekolah sebelum tamat; berhenti sekolah, tidak dapat melanjutkan sekolah” [[36]](#footnote-36). Darmaningtyas mengemukakan bahwa fenomena putus sekolah adalah suatu keadaan terhentinya aktivitas pendidikan pada anak-anak usia sekolah, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan nonformal sebelum mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk bertahan hidup dalam masyarakat[[37]](#footnote-37).

Definisi yang lebih praktis dikemukakan oleh Gunawan bahwa:

Putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya. Misalnya seorang warga masyarakat atau anak yang hanya mengikuti pendidikan di SD sampai kelas lima, disebut sebagai putus sekolah SD. Demikian juga seorang warga masyarakat yang memiliki ijazah SD kemudian mengikuti pendidikan di SMP sampai kelas dua saja, disebut putus SMP, dan seterusnya[[38]](#footnote-38).

Berdasarkan uraian teoritis di atas, dapat dirumuskan bahwa anak putus sekolah adalah murid/siswa di suatu sekolah yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya, atau berhenti sebelum waktunya selesai, atau murid yang tidak tamat menyelesaikan program belajarnya.

Program belajar yang dimaksudkan disini adalah program belajar yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu wajib belajar (wajar) 9 tahun. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama sembilan tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas satu SD atau MI hingga kelas Sembilan SMP atau MTs. Melalui program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki semua warga negara sebagai bekal untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat dan dapat melanjutkan pendidikannya ketingkat yang lebih tinggi baik ke lembaga pendidikan sekolah ataupun luar sekolah.

Ketentuan mengenai program wajib belajar tersebut di atur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 34 yang menyatakan, wajib belajar adalah (1) Setiap warga negara yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerindah daerah, dan masyarakat.

Setelah menelaah uraian teoritis di atas, dapat dipahami bahwa putus sekolah adalah proses berhentinya anak dari aktivitas pendidikan sebelum menyelesaikan program wajib belajar selama 9 tahun. Dengan pengertian ini, maka anak-anak yang sudah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD) namun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya (SMP) dan atau melanjutkan namun tidak menyelesaikannya dapat dikategorikan sebagai anak putus sekolah.

Adapun anak putus sekolah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah siswa tamatan sekolah dasar (SD) yang tidak melanjutkan pendidikan dan yang melanjutkan pendidikan namun tidak menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP).

1. **Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah**

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Tentu saja, kejadian berhentinya anak dari lembaga pendidikan (putus sekolah) tersebut merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki, baik oleh anak itu sendiri maupun orang tuanya. Meski demikian, kasus anak putus sekolah terus terjadi karena didorong oleh berbagai faktor.

Burhannudin dalam Prihatin menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi indikatornya antara lain penghasilan orang tua, mata pencaharian atau pekerjaan orang tua, jumlah anak atau anggota keluarga yang menjadi tanggungan dan status tempat tingal.
2. Kurangnya perhatian orang tua/wali indikatornya antara lain tanggapan mengenai sekolah, semangat menyekolahkan anak dan penyediaan fasilitas belajar bagi anak.
3. Fasilitas belajar yang kurang memadai indikatornya antara lain ketersediaan media pembelajaran di sekolah dan ketersediaan buku pembelajaran.
4. Faktor rendahnya atau kurangnya minat anak untuk bersekolah indikatornya antara lain semangat atau keinginan untuk bersekolah dan usaha yang dilakukan untuk tetap bersekolah.
5. Faktor budaya indikatornya antara lain perilaku masyarakat dalam menyekolahkan anaknya dan pola pikir masyarakat tentang pendidikan.
6. Faktor lokasi atau letak sekolah indikatornya antara lain letak sekolah dan jarak yang di tempuh dari rumah ke sekolah[[39]](#footnote-39).

Demikian pula, Mulyadi mengemukakan faktor-faktor penyebab anak putus sekolah adalah “faktor ekonomi, minat anak yang kurang, perhatian orang tua rendah, faktor budaya, fasilitas belajar kurang, ketiadaan sekolah/sarana, dan cacat atau kelainan jiwa”[[40]](#footnote-40).

Dari semua faktor-faktor tersebut, tampaknya faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan sebagai penyebab anak putus sekolah. Hal tersebut sesuai dengan data hasil penelitian Bank Dunia tahun 2005, yang menyebutukan bahwa:

Pada saat ini di dunia terdapat tidak kurang dari 50% usia anak-anak yang tidak sempat mengenyam bangku sekolah atau dengan kata lain tidak mengenal pendidikan apapun. Data yang diperoleh menunjukan bahwa penyebab utama dari mengapa anak-anak tersebut tidak sekolah adalah karena ketidakmampuan dari segi biaya. Pada umumnya mereka ini dari keluarga tidak mampu, karena orang tuanya bekerja sebagai petani dan buruh. Dan angka-angka tersebut di dominasi anak–anak yang berasal dari kawasan Asia, termasuk Indonesia[[41]](#footnote-41).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan anak berhenti dari mengikuti pendidikan (putus sekolah). Diantara faktor-faktor tersebut adalah faktor ekonomi, faktor perhatian orang tua yang rendah, faktor budaya masyarakat setempat, faktor sarana dan prasarana belajar, faktor lokasi tempat tinggal anak yang jauh dari sekolah, dan juga faktor rendahnya minat anak untuk sekolah. Faktor-faktor tersebut dapat saling berkaitan antara satu dengan lainnya dalam memicu timbulnya kasus anak putus sekolah. Misalnya: faktor ekonomi keluarga yang rendah menyebabkan orang tua kurang perhatian terhadap pendidikan anak. Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi kurangnya fasilitas belajar anak sehingga anak menjadi tidak berminat untuk sekolah.

1. **Penelitian Yang Relevan**

Sepanjang pengetahuan peneliti , telah ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pelaksanaan pendidikan alternatif, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mohammad Ali Fauzi dalam skripsinya yang berjudul “Pendidikan Alternatif Kaum Marginal (Studi Kasus Proses Pembelajaran PAI di SMP Alternatif Qaryah Thayyibah Desa Kalibening Salatiga)”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa (1) Pendidikan alternatif kaum marjinal muncul sebagai reaksi atas anggapan kurang tepatnya kurikulum nasional yang dibuat pemerintah, karena pertimbangan kondisi masyarakat setempat yang spesifik menjadi dasar dibuatnya program pendidikan alternatif yang tampak khas, kreatif, dan jauh lebih berkemanusiaan dibanding dengan model pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah. Pendidikan alternatif bukan sebagai pengganti sekolah formal, melainkan mencari materi dan metode dedaktik baru dan kurikulum baru. Pendidikan alternatif juga merupakan unsur imperatif dalam masyarakat madani. (2) Model pembelajaran PAI di SMP Alternatif Qaryah Thayyibah menggunakan praxis yakni aksi kultur, proses pembelajarannya merupakan bagian langsung dari realitas, visi dan misi yang diintegrasikan kedalam keseharian siswa yang memunculkan kesadaran untuk belajar dari dalam diri siswa yang nantinya mengantarkan pada “belajar sejati” adalah tahap dimana seorang anak punya kesadaran diri untuk memperhatikan, mempelajari, dan menekuni segala hal yang dialaminya sehari-hari secara terus menerus. (3) Aplikasinya Pendidikan alternatif kaum marjinal dalm pembelajaran PAI di Qaryah Thayyibah cenderung memberikan prioritas pada lapis sistem pembelajaran dan lapisan pengalaman belajar, yang tujuan dan isi pendidikan difokuskan pada pembentukan watak, budi pekerti, imtaq, wawasan kedepan, integritas dan kemandirian peserta didik, dan bukannya beban mata pelajaran yang harus dihafal. Dalam proses pembelajarannya dengan menerapkan konsep belajar mandiri, belajar berkelompok sebaya, belajar kooperatif, tutorial, serta pada waktu dan tempat yang sesuai dengan kondisi dan situasi siswa.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Mulyana (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Manajemen Kurikulum SMP Terbuka di Kecamatan Tenjo-Bogor. Dalam penelitian ini, ia menemukan bahwa SMP Terbuka yang ada di Kecamatan Tenjo mampu melaksanakan program kurikulum yang disesuaikan dengan aturan pemerintah seperti KBK dan KTSP. Tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SMP Terbuka Tenjo dapat membangun kerjasama dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab masing-masing. Dengan demikian, mutu dan kualitas pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan manajemen kurikulum dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional.

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan di atas, ada aspek-aspek tertentu yang memiliki kesamaan dengan proposal penelitian ini yaitu terletak pada bidang kajiannya yang membahas tentang penyelenggaraan pendidikan alternatif. Namun persamaan tersebut tidak menyangkut substansi yang diteliti karena fokus masalah yang ingin diteliti dalam proposal penelitian ini berbeda dengan fokus masalah yang ada dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengungkapkan sejauhmana implementasi model pendidikan alternatif pada jalur pendidikan formal khususnya SMP Terbuka dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menanggulangi masalah anak putus sekolah. Dengan memahami masalah pokok yang ingin dikaji dalam penelitian ini, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan penelitian ini bukan merupakan plagiat.

1. Marlina Gazali., *Dasar-Dasar Pendidikan,* Kendari, Depag RI, 2007, h. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.,* h. 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Radja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001. h.18. [↑](#footnote-ref-3)
4. Gazali., *Dasar-Dasar,* h. 3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mudyaharjo., *Pengantar,* h. 19. [↑](#footnote-ref-5)
6. Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* Cet. I, Jakarta Selatan, 2004., h. 93. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ahmadi, A. dan Nur Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta. 1991. h. 99. [↑](#footnote-ref-7)
8. Suardi, M. *Pengantar pendidikan teori dan aplikasi*. Jakarta : PT Indeks. 2010 h. 7. [↑](#footnote-ref-8)
9. Suwarno. *Pengantar Umum Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992. h. 52. [↑](#footnote-ref-9)
10. Angga Tanama Putra. *UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. [https://www.academia.edu/4563266/Makalah\_Tujuan\_Pendidikan.html](https://www.academia.edu/4563266/MAKALAH_TUJUAN_PENDIDIKAN.html) (*Diunduh* 2014/10/28). [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*. h. 52. [↑](#footnote-ref-11)
12. Suwarno, *Pengantar*. h. 52. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*. h. 7. [↑](#footnote-ref-13)
14. Suardi, *Pengantar.* h. 7. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*. h. 53. [↑](#footnote-ref-15)
16. Syaiful Bahri Dajamarah, *Strategi Belajar mengajar*, Rieneka Cipta, Jakarta 2010.h.109. [↑](#footnote-ref-16)
17. Abuddin Nata, *Filsafat Pendidkan Islam I* , Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, h.82. [↑](#footnote-ref-17)
18. [http:/tommysyatriadi.blogspot.com/2013/06/3-faktor-utama-keberhasilan-pendidikan.htm](http://tommysyatriadi.blogspot.com/2013/06/3-faktor-utama-keberhasilan-pendidikan.htm)l ((*Diakses* 2014/10/28). [↑](#footnote-ref-18)
19. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2001. h. 84. [↑](#footnote-ref-19)
20. Badudu Zain, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar, 2001, h. 32. [↑](#footnote-ref-20)
21. Johar, *Membedah Pendidikan Alternatif di Indonesia (Kumpulan Tulisan kompas di berbagai edisi dalam buku kompas: Kurikulum yang mencerdasakan, Visi 2003 dan Pendidikan Alternatif)*, Jakarta: Media Kompas Nusantara, 2007, h. 150. [↑](#footnote-ref-21)
22. Umberto Sihombing, *Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa, 2001, h. 32. [↑](#footnote-ref-22)
23. Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan.* Jakarta: Adicita Karya Nusa, 2001, h. 176. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.*, h. 35. [↑](#footnote-ref-24)
25. Suyanto & Abbas, *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa,* Jakarta: Komputindo, 2008., h. 36. [↑](#footnote-ref-25)
26. Sihombing, *Konsep*, h. 38. [↑](#footnote-ref-26)
27. Supriadi, *Reformasi,* h. 199. [↑](#footnote-ref-27)
28. Masaudin, *Menemukan Sekolah yang Membebaskan*, Bandung: Kawan Pustaka, 2005*,*  h. 200. [↑](#footnote-ref-28)
29. Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta Bumi Aksara, 1992. h 84. [↑](#footnote-ref-29)
30. Supriadi, *Reformasi.* h. 201. [↑](#footnote-ref-30)
31. Jerry Mintz, *The Handbook of Alternative Education*, New York: Macmillan Publishing Company, 1994, h. 11. [↑](#footnote-ref-31)
32. Wahyoetono, *Perguruan Tinggi Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan,* Jakarta: Gema Insani Press, 2005, h. 72. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid.,* h 72. [↑](#footnote-ref-33)
34. H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan,* Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 57. [↑](#footnote-ref-34)
35. FilzaChairiyah, *Pendidikan Alternatif: Menjawab Agenda Reformasi,* Jakarta: Gema Insani Press, 2013, h. 16. [↑](#footnote-ref-35)
36. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III. Jakarta: Balai Pustaka, 2003, h. 914. [↑](#footnote-ref-36)
37. Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan,* Jakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005, h. 332. [↑](#footnote-ref-37)
38. H. Ary Gunawan, *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan,* Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 71. [↑](#footnote-ref-38)
39. Febriana Prihatin, *Mengurai Fenomena Anak Putus Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 29. [↑](#footnote-ref-39)
40. Mulyadi Abiyoso, *Problem Putus Sekolah*. Jakarta: Quantum, 2008, h. 43. [↑](#footnote-ref-40)
41. C. E. Beeby, *Pendidikan di Indonesia: Penilaian dan Pedoman Perencanaan*, cet. III. Jakarta: LP3Es, 2007, h. 19. [↑](#footnote-ref-41)